

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bina Cipta, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta
- Farid, Zaini Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hikam, Muhammad A.S. 2002. *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Penerbit Bentara. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F.1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- dan C. Djisman Samosir, 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung
- M. Gaffar, Janedjri. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. FH UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2002. *Sosiologi Hukum*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Rahman, Arifin. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Surabaya.
- Rasjidi, Lili, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo.2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sardini, Nur Hidayat, 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. BPHN & Binacipta, Jakarta.

-----, 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

- Anib Bastian, Rustam, Yusrianto, 2024, *Netralitas Kepolisian Republik Indonesia Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, JHPIS Vol. 3.
- Aurel Croissant, 2002, *Electoral Politics in South Korea*, Korean Observer.
- Aria, Nani, Efren, dan Riki, 2024, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Nagari Law Review, Vol 7, No. 3.
- Elwidarifa, Robi, Gitra, 2024, *Politik Dinasti dari Perspektif Demokrasi dan Hak Warga Negara Dalam Pemilu di Indonesia*, Nagari Law Review Vol. 7, No. 3.
- Fachrul Marasabessy, 2024, *Pengaruh Cawe-Cawe Presiden Terhadap Netralitas Polri di Pilpres 2024*, Islamic Law Studies, Vol. 3.
- Falaakh Fajrul dkk, 2001, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, Yogyakarta, FH UGM.
- Farras, Aria Zurnetti, Edita Elda, 2024, *Legal Policy of the Establishment of Deputy Attorney General for Military Affairs in the Structure of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia*, Nagari Law Review, Vol. 7, No. 3.
- Mikyal Salsabila, 2023, *Hak Memilih TNI Dan POLRI dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal UIN Walisongo Semarang Vol. 1, No. 3.
- Muhammad Ardiansyah, Febria Mutiara, 2024, *Pencatutan ASN Dan TNI/POLRI dalam Keanggotaan Partai Politik*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 1.
- Muradi, 2018, *Urgensi Peran Profesionalisme Polri dalam Praktik Demokrasi Lokal*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 12, No. 1.
- Nani Mulyati, Topo Santoso, 2019, *Politycal Party's Criminal Liability In Indonesia*, Indonesia Law Review, Vol. 9, No. 2.
- Putu Eva, Putri, Hadi Saputra, 2024, *Sosialisasi Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
- Robi Cahyadi Kurniawan, 2024, *Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Di Kota Bandar Lampung*, AJSH Unila, Vol. 4, No. 3.
- Sarah Nuraini, 2019, *Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 19, No. 1.
- Setiya Pramana, Muhammad Junaidi, 2020, *Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Alam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum*, USM Law Review.
- Soedarsono Teguh, 2010, *Netralitas Polri dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Millah IX, Vol. 2.
- Su-Young San, 2019, *A Study on Introduction of Autonomous Police System in Korea*, Daegu University.
- Teguh Soedarsono, 2010, *Netralitas Polri Dalam pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*, Millah Vol. IX, No. 2.

Yonatan, Elwi Danil, Aria Zurnetti, 2023, *Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru dari Perspektif Asas Legalitas*, Nagari Law Review, Vol. 7, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7548956/2-oknum-perwira-polisi-diduga-ikut-deklarasi-bacalon-bupati-bone-dicopot>, diakses pada tanggal 2 Juli 2025.

